

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Inovasi dalam pemerintahan seringkali menjadi suatu pembaharuan atau perbaikan yang unik untuk memperbaiki tatanan pada pelayanan pemerintahan. Berdasarkan pemahaman Rogers dalam Mirnasari, inovasi merupakan gagasan, praktek, atau objek yang dirasa baru oleh perseorangan dalam satu elemen adopsi lainnya (Mirnasari, 2013). Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik memaparkan mengenai inovasi berupa pelayanan dapat menjadi suatu strategi baru untuk jenis pelayanan, baik dari aspek gagasan atau ide kreatif original dan/atau penyesuaian yang menuai kebergunaan bagi masyarakat secara langsung atau tidak langsung.

Saat ini inovasi digencarkan untuk mengatasi masalah yang berada di lingkup masyarakat (publik). Karenanya Kota Metro sebagai daerah yang berkeinginan melakukan perkembangan agar semakin maju melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan melalui inovasi. Salah satunya yaitu inovasi teknologi informasi. Inovasi teknologi informasi merupakan suatu metode dan proses yang dihasilkan dari pendayagunaan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas atau mutu bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Inovasi

Daerah Pasal 3 dijelaskan bahwa inovasi daerah dilaksanakan dengan prinsip perbaikan efisiensi, pengembangan efektivitas, peningkatan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, fokus kepada kepentingan umum, diselenggarakan secara terbuka, mencakup nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya serta tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Pemanfaatan teknologi informasi di Kota Metro berguna untuk memudahkan pemerintah dalam memberikan pelayanan serta tepat sasaran dalam kebijakan-kebijakan yang berlangsung. Hal ini dibuktikan langsung dari visi misi Kota Metro. Pemerintah juga mulai menggalakkan dan berlomba-lomba dalam inovasi demi terwujudnya *smart city*. Kota Metro sedang dalam tahap persiapan menuju *smart city*, dimana pada tahun 2021 tengah merumuskan Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sehingga dipandang perlu untuk menyiapkan proses transformasi menuju masyarakat digital Kota Metro.

Pada tahun 2019 pemerintah Kota Metro menunjukkan keseriusannya di bidang *e-government* dengan membentuk dan mengusung Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik bersama Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung. Kemudian Naskah Akademik tersebut menjadi bahan pertimbangan dan diskusi pada proses legislasi oleh DPRD Kota Metro yang kemudian disahkan menjadi Peraturan Daerah. Apabila merujuk pada Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terdapat beberapa kajian yang menarik untuk dilihat, dimana terdapat identifikasi masalah yang berupaya untuk dicari

solusinya. Permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan oleh Mukhlis (2019 : 6)

diantaranya yaitu :

1. Alamat website [info.kotametro.go.id](http://info.kotametro.go.id) dapat ditemui bahwa pelayanan pada situs Pemerintah Kota Metro belum ditopang dengan mekanisme manajemen yang memadai. Karena kesiapan prosedur dan regulasi mempengaruhi proses kerja. Selain itu keterbatasan SDM juga terbatas sehingga menghalangi terobosan komputerisasi pada mekanisme proses kerja pada Perangkat Daerah.
2. Belum matangnya strategi yang disiapkan serta tidak optimalnya insentif anggaran yang dialokasikan guna pengembangan *e-government* pada Perangkat Daerah masing-masing.
3. Prakarsa yang muncul ialah bentuk upaya masing-masing Perangkat Daerah; hal ini akan mempengaruhi ketidakefektifan mekanisme pelayanan pada standarisasi, otentikasi, keamanan informasi, dan berbagai aplikasi dasar yang berpengaruh pada kesesuaian antar situs secara optimal, bebas dari bahaya, dan mengiktikadkan dalam mewujudkan sistem manajemen dan proses kerja pada seluruh Perangkat Daerah.
4. Pendekatan yang dilakukan yaitu dengan mengurus daerah masing-masing yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan pada kemampuan masyarakat untuk menggunakan jaringan internet sehingga terjadi keterbatasan pencapaian dari layanan publik yang dikembangkan.

Permasalahan yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa sumber daya manusia di Kota Metro, khususnya pada Perangkat Daerah belum siap dalam menerima serta mengembangkan teknologi informasi karena masih terbatasnya pengetahuan mengenai komputerasi sistem dan proses kerja belum berjalan secara efektif. Strategi yang telah diimplementasikan pun belum mapan, padahal strategi sangat menentukan implementasi yang akan berjalan. Alokasi anggaran yang diberikan untuk pengembangan *e-government* di Kota Metro tidak memadai sedangkan anggaran merupakan hal krusial dan sangat berpengaruh untuk program. Standar operasional prosedur meliputi keamanan informasi, kesinambungan antar situs, dan sistem manajemen yang terintegrasi. Proses kerja belum berjalan secara optimal serta masih terdapat kesenjangan kemampuan masyarakat untuk menggunakan akses jaringan internet. Akses jaringan internet merupakan hal utama apabila ingin berkecimpung dalam mengembangkan teknologi informasi.

Pemerintah menjadi pusat dalam pergerakan inovasi teknologi informasi. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Inovasi Daerah menjelaskan mengenai fungsi pemerintah daerah yang dimaksudkan pada inovasi daerah yaitu pemerintah daerah wajib memprioritaskan dalam merumuskan rancangan kegiatan di bidang IPTEK yang disampaikan sebagai kegiatan utama bagi pengembangan IPTEK. Kemudian dijabarkan kembali mengenai fungsi dari pemerintah daerah untuk inovasi daerah adalah membudayakan dan memajukan inovasi yang berkaitan dengan teknologi, memberikan dorongan dan fasilitasi, memberikan motivasi, mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan

kemitraan pada unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Inovasi berbasis teknologi informasi yang telah diinisiasi bernama Wakuncar. Wakuncar merupakan kepanjangan dari Waktu Kunjung Cari Data dan Informasi yang menjadi bukti nyata bahwa Kota Metro menerapkan teknologi informasi untuk kemajuan masyarakat. Inovasi tata kelola pemerintahan daerah berupa Wakuncar diatur berdasarkan Surat Keputusan Walikota Metro Nomor 605/KPTS/D-07/2021 Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Kegiatan Wakuncar (Waktu Kunjung Cari Data dan Informasi) Kota Metro. Berdasarkan (Diskominfo, 2021), Wakuncar menjadi suatu gagasan dari Ketua TP PKK Kota Metro yang prihatin melihat kecenderungan dimana semakin berkurangnya semangat gotong royong dan sapa tetangga. Kemudian hal ini disambut baik oleh Pemerintah Kota Metro serta menjadikan Wakuncar bermitra dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi khususnya pada bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi.

Keprihatinan Ketua TP PKK bukanlah tanpa alasan, hal ini dapat dilihat pada data capaian performa urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kota Metro. Capaian Indikator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Metro Tahun 2016-2020 :

**Tabel 1. 1 Capaian Indikator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

**Kota Metro Tahun 2016-2020**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Jumlah Kelompok Binaan PKK	Kelompok	5,74	5,02	5,24	5,72	5,73
3	Persentase LPM Aktif	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase PKK Aktif	Persen	N/A	75,66	76,61	86,90	98,96
5	Persentase Posyandu Aktif	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	Persen	N/A	N/A	N/A	36,36	45,45

**Sumber : Olah Data Bappeda dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam RPJMD Kota Metro, 2021**

Berdasarkan Olah Data Bappeda dari Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat diketahui bahwa persentase paling kecil dari jumlah binaan PKK yaitu pada tahun 2017. Namun sejak 2017, persentase jumlah binaan PKK mengalami peningkatan walaupun tidak naik secara signifikan. Sedangkan persentase pada PKK aktif setiap tahunnya memiliki persentase yang meningkat. Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat juga memiliki persentase yang meningkat. Namun

masih jauh dari persentase yang baik yaitu paling baik pada tahun 2020 hanya sebesar 45,45. Apabila melihat dari tahun 2016-2018, jumlah persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat bahkan tidak diketahui. Hal ini menunjukkan bahwa swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat sulit dilakukan. Salah satu hal yang mempengaruhi yaitu masyarakat Kota Metro yang heterogen. Namun Ketua TP PKK terus gencar untuk meningkatkan swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat dengan membuat gagasan program Wakuncar.

Awalnya Wakuncar merupakan suatu upaya dalam merespon Covid-19, dimana program Wakuncar dilakukan untuk mendata warga yang bergejala Covid-19 serta dilaporkan secara berjenjang sampai ke Dinas Kesehatan. Seiring berjalannya waktu, data yang diinput pada google form tidak hanya berbasis data kesehatan melainkan juga Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) dan UMKM, Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), data kemiskinan, dan potensi kelurahan lainnya. Data yang diinput secara otomatis terhimpun dalam google spreadsheet. Data tersebut kemudian diolah oleh operator, dalam hal ini berkolaborasi dengan Karang Taruna dan selanjutnya Koperator melaporkan hasilnya kepada lurah untuk kemudian sebagai data base yang dapat dimanfaatkan dalam proses pengambilan kebijakan. Wakuncar tak hanya menjadi sekedar program pemerintah untuk menginput data berupa digitalisasi data yang membentuk *smart community*, tetapi juga berkaitan erat dengan terpelihara semangat gotong royong, serta peningkatan ekonomi.

Wakuncar merupakan inovasi yang unik dan menarik. Selain itu, bisa menjadi wadah untuk mengkawal apakah keberjalanan inovasi sudah cukup baik atau belum di Kota Metro. Wakuncar sebagai peningkatan kualitas data di Kota Metro melalui format digital dan data spasial dianggap menjadi urgensi dan perlunya diperbaiki pendataan yang telah dilakukan sebelumnya. Menurut Pollit dalam Prasetyo (2018:46), inovasi ditafsirkan sebagai kondisi yang diperlukan untuk modernisasi pemerintah agar dapat menghadapi tantangan sosial baru. Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah saat ini berkaitan dengan teknologi informasi yang berdampingan erat dengan masyarakat. Tantangan menjadi tuntutan kepada pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Keterkaitan perencanaan dan penerapan teknologi informasi dengan inovasi memiliki kebermanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat, maka birokrasi harus secara struktur menyusun dan mengimplementasikan penerapan teknologi informasi yang ada. Inovasi pemerintah daerah bertujuan untuk menentukan arah gerak dan pengembangan suatu daerah agar dapat direalisasikan dan berbuah hasil dari kegiatan pemerintah.

Menurut Robert B. Seidman, dkk., dalam Anggara (2014 : 30-31 ), masalah dapat muncul akibat beberapa hal yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, diantaranya proses, kepentingan, regulasi, kesempatan, kapasitas, komunikasi, dan ideologi. Sedangkan hukum merupakan fundamental agar program dan pemerintahan dapat menggunakan bentuk resmi yang bersifat mengikat kepada khalayak umum. Hukum pada hakikatnya harus hadir dalam rangka pembuatan program inovasi untuk mengarahkan dan mendorong program sesuai pada Pancasila dan UUD 1945. Pada

pembuatan dan pelaksanaan program, hukum memiliki daya guna sebagai sarana pengendali dan sumber referensi yang mengikat dalam penyelenggaraan seluruh kegiatan penyelenggaraan mekanisme pemerintahan (Atmaja, 2013 : 14).

Apabila kita merujuk pada isu hukum dengan kebijakan publik, menurut Atmaja (2013 : 15) terdapat keterkaitan diantara keduanya, yaitu :

1. Sumber hukum kebijakan publik: Hukum sebagai instrumen kebijakan publik harus didasari pada kebijakan publik. Sumber pembuatan kebijakan publik dapat ditilik dari pertimbangan materi. Materi yang perlu pertimbangan adalah berbagai informasi, data, atau gagasan dan saran yang bersifat obyektif yang hadir dari berbagai sumber, baik dari dalam maupun dari luar organisasi pemerintah (Mustopadidjaya, 1988). Wakuncar pada hakikatnya tidak hanya menjadi inovasi tetapi perlu dipahami pula bahwa harus terdapat pertimbangan mengapa wakuncar menjadi salah satu inovasi kebijakan di Kota Metro.
2. Bentuk hukum kebijakan publik: bentuk hukum program dibentuk dari sistem hukum yang menghasilkan bentuk hukum formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik.
3. Hukum mengarah pada kebijakan publik, strata kebijakan publik, dan hierarki peraturan perundang-undangan.
4. Perumusan program pada proses hukum: pendekatan perumusan program dalam pembuatan hukum (penyusunan peraturan perundang-undangan) dan pendekatan implementasi kebijakan publik dalam penyelenggaraan serta penegakan hukum.

5. Sistem nilai dalam program yang membentuk moral yaitu perspektif moral hukum berlandas program.

Berdasarkan pemaparan Atmaja dapat disimpulkan bahwasannya regulasi merupakan perkara vital yang harus dimiliki oleh program. Kesiapan pemerintah dalam menjalankan inovasi berbasis program berawal dari kesiapan pemerintah secara administratif. Inovasi bukanlah perihal apa yang telah diusulkan oleh pemerintah, tetapi juga mencakup pada arah tindakan atau apa yang telah dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas pengembangan *E-Government* di Indonesia harus berkomitmen khususnya pada hal infrastruktur, sumber daya manusia, aplikasi, regulasi, dan sosialisasi di lingkungan pemerintah dan masyarakat (Yosef, 2021). Wakuncar dikatakan sebagai inovasi yang berbasis teknologi dikarenakan tujuan dari program untuk ketercapaian proses transformasi budaya literasi digital dan proses digitalisasi data dan monografi (potensi) kelurahan.

Penelitian menarik untuk dilakukan karena program Wakuncar diusung langsung oleh Ketua TP PKK Kota Metro Provinsi Lampung sehingga dapat dianalisis dari segi politis. Unsur politis pada program dapat diidentifikasi dari model top down. Substansi dari inovasi program yang berbasis digital dan berdampingan dengan Kader Dasawisma guna meningkatkan kualitas SDM menjadikan persoalan unik untuk dikaji lebih mendetail. Analisis yang dihasilkan dari penelitian juga dapat mendalami mengenai keadaan program dengan menilik Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Keuangan, infrastruktur, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan program.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan inovasi program Wakuncar (Waktu Kunjung Cari Data dan Informasi) di Kelurahan Rejomulyo Kota Metro Provinsi Lampung?
2. Bagaimana ketidakberlanjutan dari inovasi program Wakuncar (Waktu Kunjung Cari Data dan Informasi) di Kelurahan Rejomulyo Kota Metro?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis terkait proses penerapan *e-government* berupa inovasi Wakuncar dalam pemberdayaan masyarakat.
2. Mendiskusikan pelaksanaan dan ketidakberlanjutan dari inovasi berupa teknologi informasi (Wakuncar) di Kelurahan Rejomulyo Kota Metro.
3. Mengidentifikasi peran, pengaruh, atau dampak dari implementasi inovasi Wakuncar khususnya pada pemecahan masalah publik di Kelurahan Rejomulyo.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berkenaan dengan manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang telah dibuat diharapkan dapat berpartisipasi dalam perkembangan studi Ilmu Politik dan Pemerintahan khususnya pada inovasi kebijakan. Penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan referensi bagi penelitian yang memiliki topik pembahasan serupa dan dapat melengkapi penelitian sejenis dan telah dilakukan sebelumnya.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi pembaca. Kemudian, penelitian diharapkan mampu menyampaikan informasi lebih detail mengenai implementasi teknologi informasi berupa Wakuncar di Kelurahan Rejomulyo Kota Metro. Diharapkan pula penelitian dapat menjadi jembatan transparansi terkait analisis kebutuhan infrastruktur, data, keamanan, biaya, dan kebutuhan terkait pelaksanaan Wakuncar dan dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat serta partisipasi masyarakat atas layanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Metro.

### **1.5 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian dapat diperoleh dari berbagai sumber ilmiah seperti jurnal, skripsi, tesis maupun disertasi. Penelitian terdahulu akan berfokus pada penelitian terkait inovasi teknologi informasi dan pemberdayaan masyarakat yang akan menjadi data pendukung penelitian. Data pendukung pada penelitian sebelumnya

dipergunakan untuk sumber data, acuan, serta dasar yang berupa teori atau temuan melalui output dari berbagai macam penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu memiliki muatan mengenai keberjalanan, proses, keberhasilan hingga kegagalan pemanfaatan inovasi teknologi informasi.

Inovasi program selalu menjadi hal yang dibanggakan oleh inovator. Inovasi harus didukung dengan kebijakan berupa instrumen, seperti landasan hukum, desain inovasi, anggaran, sumber daya manusia maupun advokasinya (Taylor, 2007). Sama halnya dengan argumen (Yuwono, Alfirdaus, dan Manar, 2020) yang mendukung bahwa penerapan inovasi berbasis teknologi membutuhkan sumber data yang berkaitan dengan teknologi, baik sumber daya manusia yang ahli di bidang teknologi maupun sumber daya anggaran yang terpenuhi, karena anggaran terkait teknologi merupakan kebutuhan anggaran atas teknologi sangat besar. Telah banyak kajian literatur yang membahas mengenai keberhasilan inovasi. Namun masih jarang ditemui kajian penelitian mengenai ketidakefektifan inovasi atau program yang tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi, maka dari itu diperlukan analisis mendalam mengapa dapat terjadi kemandekan yang mengakibatkan program tidak berjalan secara maksimal. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penelitian pada skripsi harus memiliki rujukan dan referensi beragam literatur agar dapat menjadi pedoman, tolak ukur, serta bahan pertimbangan dalam melakukan penulisan penelitian.

Andiyansari (2014) membahas mengenai studi pemberdayaan masyarakat pedesaan melalui teknologi informasi dan komunikasi. Penelitian dilakukan dengan metodologi penelitian kualitatif melalui metode penelitian studi kasus. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui proses mengenai implementasi pelaksanaan program Pusat Layanan Internet Kecamatan serta keberjalanan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi di Desa Banyuroto, Nanggulan, Kulon Progo dalam pemberdayaan masyarakat yang berpengaruh pada pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat sebuah proses perubahan dari masyarakat pedesaan menuju masyarakat yang paham mengenai teknologi informasi. Hal ini ditandai berkenaan dengan pandangan mengenai internet sebagai sebuah media untuk menggali dan menimba informasi.

M Muafani (2021) menganalisis objek penelitian yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi di tengah pandemi Covid-19 melalui pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Wonosobo. Metode yang diterapkan dalam penelitian menggunakan studi observasi, dimana penelitian memadukan antara data lapangan dengan data pustaka dan dilengkapi dengan studi wawancara agar memberikan output yang maksimal. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan desa tidak dapat dilakukan sendiri oleh perangkat ataupun oleh pihak luar. Pengembangan desa perlu dilakukan oleh masyarakat desa itu sendiri dan pihak luar yang berkompeten

hanya sebagai pendamping. Pengembangan desa saat ini tidak dapat terlepas dari masyarakat dan pemanfaatan teknologi sehingga perlu dilakukannya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang berjalan harus memperhatikan kearifan lokal sehingga menyesuaikan dengan keadaan masyarakat. Novelty atau kebaruan penelitian yang ditulis yaitu dapat menjelaskan mengenai optimalisasi pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Wonosobo dan bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dalam masa pandemi covid-19. Pemanfaatan teknologi oleh masyarakat diantaranya yaitu pembelajaran Al Qur'an online, Kampung Cyber, UMKM Cyber dengan menerapkan aplikasi e-commerce pada UMKM, Perpustakaan Cyber, Kampung Wisata International, Teknologi Tepat Guna digunakan untuk mengatasi masalah penyediaan air bersih, resapan air, sumur artesis, jamban sehat, dan pengolahan hasil panen.

Permana, T. I. P., & Manar, D. G. (2022) membahas mengenai inovasi pelayanan publik pemerintah daerah berupa layanan elektronik pajak daerah. Penelitian ini menggunakan teori inovasi pemerintah daerah, proses inovasi, dan pelayanan publik melalui metode penelitian campuran/kombinasi sehingga analisis data dilakukan dengan mengkombinasikan kualitatif dan kuantitatif. Tujuan penelitian dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi pelaksanaan serta kepuasan masyarakat wajib pajak mengenai inovasi pelayanan publik pemerintah daerah melalui aplikasi Lek Paijo di Kota Semarang sehingga good governance dapat tercapai. Berkenaan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan mengenai proses pelaksanaan inovasi pelayanan publik

dengan menggunakan Aplikasi Lek Paijo di Kota Semarang melalui proses tahapan mengenai inovasi yaitu *persuasion, knowledge, decision, confirm,* dan *implementation* telah dilaksanakan dengan baik dan tingkat kepuasan wajib pajak ditinjau dari 5 parameter mengenai kualitas pelayanan publik yaitu *responsiveness, tangibels, reliability, assurance,* dan *emphaty* sehingga mewujudkan *good goverance*. Namun, masih terdapat kendala yaitu terdapat layanan yang tidak dapat diakses seperti layanan E-BPHTB dan kendala jaringan yang tidak stabil.

Manar dan Laila (2023) menjelaskan mengenai kegagalan inovasi yang dialami pemerintah daerah. Inovasi sendiri sering dijadikan kendaraan politik yang justru tidak sesuai dengan visi misi pemerintah dan membebani kinerja para birokrat yang kemudian menghasilkan kegagalan inovasi, dimana seharusnya inovasi ditempatkan untuk membantu serta memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Kegagalan inovasi di sebuah tempat seharusnya dikaji dan diidentifikasi agar menemukan gagasan serta titik terang untuk inovasi lainnya. Analisis artikel menggunakan ilustrasi gagasan inovasi yang mengalami kegagalan oleh pemerintah. Kegagalan inovasi dalam jurnal dimaksudkan pada gagasan inovasi yang memerlukan perombakan gagasan, tidak dapat dilanjutkan, hingga tidak dapat diimplementasikan. Identifikasi pada jurnal mengklasifikasikan faktor-faktor serta akar permasalahan yang mengakibatkan kegagalan inovasi pada aspek teknis ataupun non teknis yang menyebabkan kegagalan inovasi. Faktor utama diantaranya yaitu kebijakan, sumber daya, teknologis, fasilitas, dan tata kelola. Kemudian hasil analisis dari proses inovasi ditarik menjadi kesimpulan

sehingga menghasilkan penyebab kegagalan inovasi yang dapat menjadi referensi untuk kebutuhan inovasi mendatang. Metode yang diimplementasikan dalam penelitian adalah metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus dengan studi dokumen untuk pengumpulan data.

Adapun argumen mengenai ketakutan mengenai kegagalan yang dijabarkan oleh (Kuyat, 2011) dimana ketakutan tersebut menjadi suatu hambatan dalam menghasilkan ide baru dan seharusnya dapat menghindari konsep yang berisiko agar tidak mengalami kegagalan pada keberjalanan inovasi. Pemerintah daerah seharusnya dapat menerima resiko dalam memandang kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar yang berpeluang untuk mengembangkan ide-ide inovatif sehingga mendorong sumber daya agar lebih berkualitas dan dapat mengatasi permasalahan yang terdapat di masyarakat. Kegagalan selalu menjadi ketakutan yang berakhir pada terbatasnya inovasi yang menjadikan hambatan berkembangnya inovasi itu sendiri.

Ketakutan akan kegagalan dapat timbul pula dari reaksi dan perspektif negatif yang muncul dari kepemimpinan pemerintahan sehingga menyembunyikan kegagalan menjadi jalan pintas. Kepemimpinan harus dapat menentukan metode terbaik untuk mendorong penemuan, adopsi, dan penerapan inovasi. Visi misi yang kuat harus dipastikan dimiliki untuk membangun inovasi sehingga dapat terbentuk strategi organisasi, membangun struktur yang memfasilitasi inovasi, dan sumber daya pengembangan inovasi memiliki keahlian yang diperlukan untuk mengelola secara efektif. Ketika hal tersebut telah dimiliki, maka akan mendorong sumber

daya untuk membantu mengatasi penolakan yang melekat untuk mencapai inovasi yang berhasil. Jurnal yang berjudul "*Forsaking innovation: addressing failure and innovation behaviour variety. Technology Analysis & Strategic Management*" (Marzocchi dan Ramlogan, 2019) mengungkapkan bahwa kegagalan inovasi bukanlah hal yang harus disembunyikan, namun seringkali justru dapat menghasilkan gagasan strategi. Penelitian berorientasi pada keterlibatan respon berbagai perilaku ketika mengalami kegagalan dalam berinovasi. Temuan dari penelitian yaitu seringkali kegagalan berpengaruh pada strategi inovasi tertentu dan hal itu bergantung pada keterbukaan pemangku kebijakan dalam merespon suatu kegagalan.

Muskin dan Avianto (2021) menganalisis mengenai adopsi kebijakan inovasi tata kelola berupa program *one stop integrated*. Metode yang digunakan untuk melakukan pengumpulan data yaitu melalui pendekatan kualitatif dari berbagai sumber informasi pada implementasi program secara keseluruhan. Penelitian dilakukan berdasarkan narasumber wawancara semi terstruktur dengan informan seperti pemangku kepentingan, pelaku bisnis, dan pakar kebijakan menggunakan *simple random sampling* berdasarkan pertimbangan jenis pelayanan dan sebaran di setiap sub populasi. Pada penelitian ditemukan bahwa pengadopsian transformasi digital oleh birokrat pemerintah dalam merancang strategi pelayanan meliputi e-services, penguatan pengawasan publik, dan penguatan ekosistem inovasi dapat berdampak pada transformasi pelayanan publik.

Seluruh penelitian terdahulu mencakup berbagai macam gagasan, argumen, hingga menjadi data pendukung karena telah memuat berbagai pandangan yang berbeda sesuai dengan temuan dari penelitian. Perspektif perbedaan pandangan tersebut akan menunjang dalam membuat penelitian ini. Penelitian terdahulu menghasilkan beberapa poin untuk analisis diantaranya melihat proses, aspek, kerangka berpikir, sebab, akibat, faktor, dan perspektif untuk memberikan solusi serta saran pada topik yang dibahas pada penelitian.

## **1.6 Kerangka Teori**

### **1.6.1 Inovasi**

Inovasi menjadi satu hal yang masih terus diusahakan dan dilakukan oleh pemerintah sehingga teori mengenai inovasi telah banyak merebak dan masih berkembang hingga saat ini. Inovasi pemerintah daerah bertujuan untuk menentukan arah gerak dan pengembangan suatu daerah agar dapat direalisasikan dan berbuah hasil dari kegiatan pemerintah. Rosenfield dalam Sutarno (2012:132) menjelaskan bahwa inovasi merupakan suatu perubahan pengetahuan kepada produk, proses, dan jasa baru, serta tindakan menggunakan sesuatu yang baru. Sedangkan penuturan Mitra dalam Sutarno, inovasi diterjemahkan sebagai pendayagunaan yang berhasil dari suatu ide baru atau sebagai transformasi pengetahuan, keterampilan teknologi, dan pengalaman untuk membuat produk, proses, dan jasa baru. Pada proses

melakukan inovasi dengan elemen baru yang dilakukan oleh pemerintah berfokus pada perbaikan dalam menyalurkan peningkatan pelayanan publik dengan proses pada pengadopsian yang berbeda pada tahap pengembangannya (Alberti & Bertucci, 2007).

Menurut pemaparan Suryani (2008:304), inovasi apabila dikaitkan dalam konsep yang luas tidak hanya terbatas pada produk, tetapi dapat berupa ide, cara-cara, ataupun objek yang dipandang oleh seseorang sebagai sesuatu yang baru. Menurut Pollit dalam Prasetyo (2018:46), inovasi ditafsirkan sebagai kondisi yang diperlukan untuk modernisasi pemerintah agar dapat menghadapi tantangan sosial baru. Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah saat ini berkaitan dengan teknologi informasi yang berdampak erat dengan masyarakat. Tantangan menjadi tuntutan kepada pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Keterkaitan perencanaan dan penerapan teknologi informasi dengan inovasi memiliki kebermanfaatannya yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, birokrasi harus secara struktur dalam menyusun dan mengimplementasikan penerapan teknologi informasi yang ada.

Pemaparan mengenai pendapat dari para ahli dapat disimpulkan bahwa inovasi merupakan suatu ide, gagasan baru, cara-cara, transformasi baru, mobilisasi pengetahuan, dan keterampilan teknologi untuk menciptakan suatu produk, proses, hingga jasa baru. Saat ini, ide

untuk berinovasi dari seorang pemimpin yang bertujuan dalam mengembangkan daerahnya menjadi hal yang terelakkan di Kota Metro. TP PKK dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Metro mengusung gagasan berupa inovasi berbasis keterampilan teknologi informasi berupa Program (Waktu Kunjung Cari Data dan Informasi). Gagasan atau ide untuk berinovasi dikembangkan untuk memecahkan masalah. Namun ide saja tidak cukup, sehingga harus dituangkan dalam realisasi program yang berjalan.

Inovasi memiliki makna adanya penemuan cara baru dan kebijakan baru yang berasal dari ide-ide baru, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menjadi bagian dari kinerja pemerintahan. Inovasi seringkali dianggap sebagai bentuk beban kerja tambahan karena adopsi inovasi kerap sulit pada implementasinya. Alasan sumber daya manusia yang terbatas Choi & Chandler (2020), sumber pendanaan yang tidak mencukupi serta sulitnya mengubah budaya kerja birokrasi dari manual ke digital menjadi hal yang lazim ditemui (Asatryan, Heinemann, & Pitlik, 2017; Buso, Marty, & Tran, 2017; Effah & Nuhu, 2017).

### **1.6.2 Politik Inovasi**

Manar dan Alfirdaus (2023) mengungkapkan bahwasannya inovasi merupakan produk politik yang tidak dapat terpisahkan dengan

struktur dan kepentingan politik. Diseminasi mengenai respon pemerintah dalam mengambil langkah untuk menjawab persoalan dengan membentuk program inovasi tentunya berkaitan dengan politik. Politik inovasi dimaksudkan sebagai diseminasi inovasi yang diusulkan oleh Ketua TP PKK Kota Metro mengenai teknologi informasi berupa program Wakuncar (Waktu Kunjung Cari Data dan Informasi).

Politik inovasi dapat dikaitkan dengan penjabaran Halvorsen et al. (2005) mengenai *top-down innovations*. *Top-down innovations* dimaksudkan dengan pemimpin yang melakukan proses perubahan perilaku, dimana top mengacu pada struktur hierarki yang tertinggi, sedangkan *bottom* mengacu pada aparatur pemerintah atau pengambil keputusan pada tingkat unit (*mid-level policy makers*). Penggagas dan relasi kuasa sebagai struktur hierarki tertinggi pada TP PKK Kota Metro menjadikan program bersifat *top-down innovations*. Karena inovasi berbasis *top-down*, maka kepemimpinan akan mempengaruhi pelaksanaan inovasi. Karena arah gerak ditentukan oleh pemimpin agar dapat melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan program.

### **1.6.3 Kegagalan Inovasi**

Kegagalan inovasi merupakan sesuatu yang lumrah terjadi. Respon terhadap kegagalan seringkali berupa ketakutan yang dapat menjadi suatu hambatan dalam menghasilkan ide baru dan mencegah

konsep yang berisiko sehingga tidak mengalami kegagalan pada keberjalanan inovasi. Pemerintah daerah seharusnya dapat menerima risiko dalam memandang kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar yang berpeluang untuk mengembangkan ide-ide inovatif sehingga mendorong sumber daya agar lebih berkualitas dan dapat mengatasi permasalahan yang terdapat di masyarakat. Kegagalan selalu menjadi ketakutan yang berakhir pada terbatasnya inovasi yang menjadikan hambatan berkembangnya inovasi itu sendiri (Kuyatt, 2011).

Kegagalan inovasi dilandasi oleh beberapa faktor yang dapat terjadi karena kurangnya komunikasi dalam inovasi serta terjadinya ketidaksesuaian hingga ketidaksiapan pada sistem inovasi (Assyifa dkk., 2023). Faktor-faktor tersebut terdengar klise dan remeh sehingga seringkali tidak dihiraukan. Selain itu, kajian inovasi pemerintahan daerah harus dilihat dari faktor yang mempengaruhi dalam keberjalanan program, baik dari faktor pendukung maupun faktor penghambat mengapa program tidak berjalan secara maksimal.

Kegagalan inovasi ditafsirkan dengan tidak bekerjanya, tidak berfungsinya, atau tidak berhasilnya sebuah upaya baru dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan. Kegagalan inovasi juga dapat disebabkan oleh aspek-aspek yang bersifat teknis. Beberapa hal antara lain ketidakcukupan ketersediaan dana, kurangnya komitmen,

kurangnya kejelasan pembagian tugas dan peran serta kurangnya pemahaman terhadap visi inovasi (Porter dan Birdi, 2018).

### 1.7 Operasionalisasi Konsep



Program wakuncar merupakan gagasan yang muncul karena beberapa faktor diantaranya yaitu masih rendahnya swadaya masyarakat dan jumlah kelompok binaan PKK terhadap program pemberdayaan masyarakat. Budaya gotong royong tidak lagi terpelihara di masyarakat sehingga program tersebut hadir agar lebih mempererat silaturahmi di masyarakat. Selain itu, program diharapkan dapat

meningkatkan SDM dalam menguasai teknologi informasi. Berdasarkan teori yang telah dipaparkan, program Wakuncar dapat dianalisis dan diidentifikasi melalui pemahaman sebab program dikatakan sebagai inovasi, keterkaitan program dengan politik inovasi, dan kegagalan inovasi.

## **1.8 Metode Penelitian**

### **1.8.1 Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif. Sugiyono (2014) menjabarkan mengenai teknik analisis data kualitatif ialah: “Proses dalam merumuskan dan mencari data secara sistematis yang diperoleh melalui hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi. Penelitian dilakukan dengan cara menstrukturkan data kedalam kategori, memaparkan kedalam komponen, mereduksi data yang penting dan akan diterapkan dalam penelitian serta menarik kesimpulan”. Penelitian kualitatif berfokus pada maksud daripada generalisasi (Anggito dan Setiawan, 2018). Kemudian makna dari penelitian deskriptif yaitu menggambarkan permasalahan secara sistematis serta lebih rinci yang berkaitan dengan proses implementasi inovasi program Wakuncar.

### **1.8.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Metro tepatnya pada Kelurahan Rejomulyo, karena Kelurahan Rejomulyo merupakan pionir dari inovasi Waktu Kunjung Cari Data dan Informasi dan dilaksanakan langsung dibawah TP PKK Kota Metro dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Metro. Berkenaan dengan lokasi sepsifik yang akan dilakukan pengamatan pada penelitian yaitu Kantor TP. PKK Kota Metro yang beralamat di Jl. Ade Irma Suryani No.11, Metro, Kec. Metro Pusat, Kota Metro, Lampung 34111 dan Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No.155, Metro, Kec. Metro Pusat, Kota Metro, Lampung 34125.

### **1.8.3 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan pokok yang bersumber dari narasumber atau informan yang dapat menyampaikan informasi terkait pokok bahasan yang akan diteliti. Pada penelitian kualitatif, subjek penelitian disebut sebagai responden. Dalam memilih responden yang akan menjadi subjek penelitian diperlukan pertimbangan dalam penerapan teknik sampling. Teknik sampling yang diterapkan yaitu *purposive sampling*. Rancangan *purposive sampling* dilakukan dengan memilih dan memilah informan untuk diwawancarai atau observasi dengan tujuan memperoleh informasi yang relevan dan memaknai

masalah yang sebenarnya terjadi (Creswell, 1999). Lebih lanjut dalam Arikunto (2010) terdapat pedoman sebagai syarat dalam melaksanakan *purposive sampling* yaitu:

- a. Proses pemilihan sampel harus berdasar pada ciri-ciri, sifat, atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama populasi yang sesuai dengan penelitian.
- b. Subjek yang dijadikan sebagai sampel merupakan narasumber yang sifatnya dominan pada karakteristik yang terdapat pada populasi (*key subjects*).
- c. Determinasi ciri populasi dipilah dengan akurat pada studi pendahuluan.

Berdasarkan rancangan penelitian, maka akan menemukan narasumber dari beberapa pihak yang akan diwawancarai. Subjek penelitian ini melingkupi dua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. Subjek penelitian dari pihak pemerintah meliputi pihak yang bertanggung jawab mengenai Wakuncar di TP. PKK Kota Metro, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Metro, dan dinas-dinas terkait yang menangani program secara langsung. Sedangkan dari pihak masyarakat yaitu pihak yang melakukan pendataan (dasawisma, karang taruna, dan pihak yang bersangkutan lainnya).

#### **1.8.4 Sumber dan Jenis Data**

Jenis data yang diterapkan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder.

##### **1.8.4.1 Data Primer**

Data primer ialah data yang langsung diterima oleh peneliti dari objek penelitian (Arikunto, 2010). Data primer menurut Kuncoro merupakan data yang didapatkan dari survei lapangan melalui semua metode pengumpulan data original. Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, tindakan yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya yaitu narasumber yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang bersumber dari narasumber secara langsung (Kuncoro,2003:148).

Proses pengambilan data primer dilakukan melalui wawancara dengan narasumber. Adapun terkait wawancara akan melibatkan komponen baik dari OPD yang bertanggung jawab atas program Wakuncar (dalam hal ini TP PKK Kota Metro dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Metro), juga terhadap komponen yang dilibatkan dalam pemberdayaan, yaitu Dasawisma dan Karang Taruna.

#### **1.8.4.2 Data Sekunder**

Data sekunder ialah data yang diimplementasikan untuk menunjang data primer. Data sekunder menurut Wandansari (2013 : 561) yaitu data yang telah diolah kemudian disajikan oleh pengumpul data serta dipublikasikan kepada masyarakat untuk kebutuhan pengguna data. Data diperoleh dari output pengamatan yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu hasil penelitian dan kajian terdahulu yang dianggap berkesinambungan untuk kepentingan penelitian.

Sumber data sekunder dilakukan dengan menempuh pemahaman berbagai sumber diantaranya literatur, buku, jurnal, serta penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan pada penelitian yang akan dilakukan. Selain itu sumber lain diantaranya yaitu koran, situs laman resmi suatu instansi, dan lainnya (Sugiyono, 2013). Data sekunder yang dapat diambil oleh peneliti antara lain data implementasi program serta berita-berita terkait pelaksanaan program Wakuncar.

### **1.8.5 Teknik Pengumpulan Data**

Metode kualitatif yang digunakan pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam mengenai penerapan inovasi teknologi informasi (Wakuncar) dalam pengembangan data dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Rejomulyo Kota Metro melalui teknik-teknik pengambilan data yaitu wawancara dan dokumentasi.

#### **1.8.5.1 Observasi**

Observasi ialah teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung yang disertai dengan pencatatan terhadap situasi, kejadian, atau peristiwa di lapangan (Raco, 2010 : 112). Observasi dilakukan agar dapat mengungkap fakta yang tidak didapatkan oleh narasumber dari wawancara. Peneliti akan melakukan pengamatan di lokasi penelitian secara langsung di Kelurahan Rejomulyo agar dapat mengetahui mengenai kendala-kendala yang terjadi selama program berlangsung.

#### **1.8.5.2 Wawancara**

Pada metode pengambilan data dilakukan dengan wawancara. Wawancara dalam penelitian kualitatif sudah semakin dominan pada segi pandangan sebagai penelitian moral (Kvale, 2007). Untuk meneliti isu mengenai inovasi kebijakan

dalam pemerintahan dilakukan wawancara dimana peneliti dan informan terlibat secara aktif dalam percakapan yang mengacu pada informasi yang berkaitan dengan penelitian. Format yang umum dalam tahap *interview* adalah perseorangan, antara peneliti dengan narasumber. Pewawancara dalam melakukan aksinya harus memastikan beberapa hal penting, seperti apakah wawancaranya dapat memperbaiki situasi (serta meningkatkan ilmu pengetahuan), seberapa sensitif interaksi wawancara dengan narasumber, pemahaman dari narasumber mengenai penafsiran perkataannya, persiapan pertanyaan-pertanyaan yang kritis untuk diajukan, dan dampak yang akan diperoleh pewawancara dan narasumber dari hasil wawancara tersebut.

Sugiyono (2014:231) memaparkan bahwasannya wawancara dipergunakan untuk teknik pengumpulan data apabila peneliti membutuhkan studi pendahuluan dari responden untuk mendapati konflik yang harus diteliti dan juga pengetahuan terkait penelitian secara mendalam. McCracken (1998) juga menuturkan bahwa pada wawancara kualitatif, pewawancara seharusnya mengajak narasumber untuk menafsirkan pengalaman dan pengetahuannya agar pewawancara (peneliti) dapat dengan mudah meninjau data (McCracken, 1998: 21) tersebut dengan menggunakan kata-kata

yang bersifat membangun. Pada hal ini, maka peneliti akan mengungkap perspektif berbeda dari pelaksanaan program dari instansi yang berkaitan.

### **1.8.5.3 Dokumentasi**

Teknik pada dokumentasi ialah teknik pengumpulan data yang diimplementasikan untuk meninjau data historis. Dokumen yang berkenaan dengan orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial akan menuai banyak manfaat dalam penelitian kualitatif (Yusuf, 2014). Dokumen yang akan dijadikan data dalam penelitian ini terkait Surat Keputusan Walikota Metro Nomor 605/KPTS/D-07/2021 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Kegiatan Wakuncar (Waktu Kunjung Cari Data dan Informasi) Kota Metro dan juga dokumen pendukung di Disnaker Pemkot Metro yang dapat mendukung penelitian ini seperti data pengguna, anggaran, dan sebagainya.

### **1.8.6 Analisis dan Interpretasi Data**

Data-data yang sudah didapatkan diatas memerlukan analisis lebih lanjut, mempertanyakan suatu hal dengan kritis, dan mencatat hasilnya di saat mengumpulkan data atau setelahnya, yang kemudian ditulis dalam laporan penelitian secara terbuka bentuk pertanyaan yang

sudah didapatkan tadi (Creswell, 2009). Selanjutnya data informasi dari narasumber yang sudah didapatkan, dianalisis menggunakan pemahaman penulis dalam menjabarkan hasil temuan pada penelitian.

#### **1.8.6.1 Reduksi Data**

Reduksi data merupakan seleksi terhadap data-data yang sudah didapatkan, karena tidak dapat dipungkiri akan terdapat beberapa data yang tidak relevan dengan tema penelitian. Dibutuhkan pemahaman secara kritis dalam menganalisa data yang didapatkan dalam penelitian. Peneliti juga akan berdiskusi dengan pihak yang bersangkutan agar data dan informasi dapat dimaknai secara mendalam untuk mengembangkan teori yang digunakan dalam penelitian.

#### **1.8.6.2 Penyajian**

Penyajian data dalam penelitian akan dideskripsikan secara rinci. Penyajian data akan didukung dengan menampilkan bentuk gambar, tabel, uraian singkat dan sejenisnya. Peneliti akan memaparkan data dengan menghubungkan studi kasus, data yang sudah didapatkan, dan landasan teori yang digunakan. Tujuan penulis dalam menampilkan data yaitu untuk memudahkan penulis dalam memahami kasus yang diteliti. Penyajian data akan memberikan

penjelasan terkait jawaban atas variabel yang digunakan dalam penelitian.

#### **1.8.6.3 Interpretasi**

Interpretasi data dilakukan dengan mengajukan pertanyaan pribadi kepada penulis sendiri. Hal tersebut berupa pelajaran atau kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian, baik membenarkan atau menyangkal informasi sebelumnya, sehingga muncul pertanyaan- pertanyaan baru bagi penulis. Pada sesi interpretasi data, peneliti harus menetapkan kevalidan informasi. Kevalidan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui negosiasi dan interogasi dengan narasumber (Berg, 2001).

#### **1.8.6.4 Kesimpulan**

Setelah melakukan pengumpulan data, pengelolaan data, hingga analisis kritis terhadap data dan hubungannya dengan landasan teori yang digunakan dalam penelitian, kemudian akan ditutup dengan kesimpulan. Simpulan peneliti dalam latar belakang awal akan dijelaskan rinci hingga tahap kesimpulan. Hal terakhir yang dilakukan peneliti dalam tahapan kesimpulan yaitu menarik kesimpulan berdasarkan apa yang sudah diperoleh penulis.

### **1.8.7 Validitas Data**

Metode wawancara dapat diimplementasikan untuk mengeksplorasi lebih detail variabel-variabel yang sudah ditelaah (Hossler & Vesper, 1993:146). Validitas data diperlukan untuk mengetahui keabsahan data yang didapatkan dalam penelitian. Pengujian validitas data tahapan ditempuh dengan proses triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data dapat ditelusuri dengan membandingkan observasi yang terjadi di lapangan dengan data wawancara serta membandingkan hasil wawancara (interview) dengan substansi dokumen yang saling berkaitan.